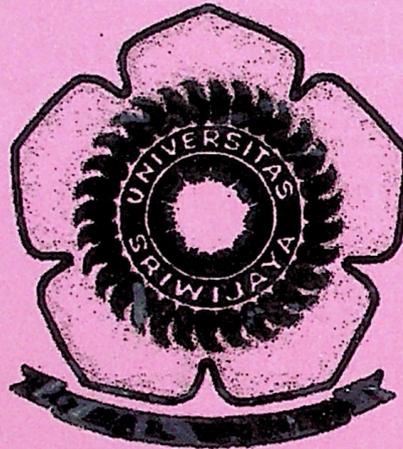


**PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH DEMOKRASI BANYUASIN DI YAYASAN
PUSPA PALEMBANG INDONESIA PERIODE 2008-2009**



OLEH

IID PRIMADONA

07 04 3102 018

JURUSAN SOSIOLOGI

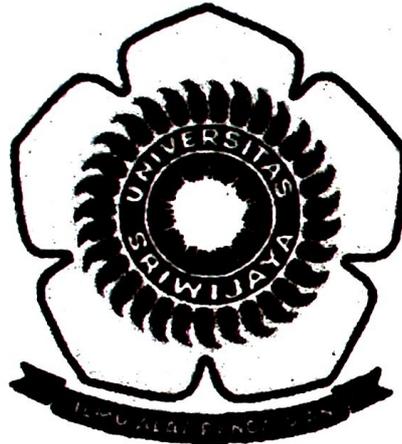
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2010

S
370.1907
IID
P
C-110106
2010

**PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH DEMOKRASI BANYUASIN DI YAYASAN
PUSPA PALEMBANG INDONESIA PERIODE 2008-2009**



OLEH

IID PRIMADONA

07 04 3102 018

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2010

LEMBAR PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH DEMOKRASI BANYUASIN DI YAYASAN PUSPA
INDONESIA PALEMBANG PERIODE 2008-2009**

SKRIPSI

**Sebagai Persyaratan Dalam Mencapai Derajat
Sarjana (S1) Ilmu Sosial**

**Diajukan Oleh
IID PRIMADONA
0704 3102 018**

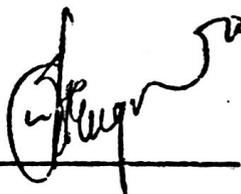
**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing
Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Pada Tanggal Januari 2011**

Dosen Pembimbing I

**Dra. Dyah Hapsari, ENH, M.Si
NIP. 19601 00219 90232 601**

Dosen Pembimbing II

**Diana Dewi Sartika S.sos, Msi
NIP. 19800 21120 03122 003**





**PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH DEMOKRASI BANYUASIN
DI YAYASAN PUSPA PALEMBANG INDONESIA PERIODE 2008-2009**

SKRIPSI

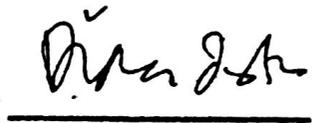
**Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
dan Dinyatakan Berhasil Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
dari Syarat-syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi
Pada Tanggal, 31 Januari 2011**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Dra. Dyah Hapsari ENH. M.Si
Ketua



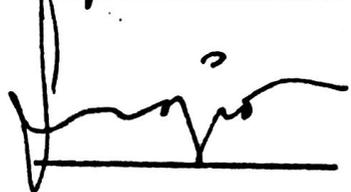
Diana Dewi Sartika S.Sos. M.Si
Anggota



Dr. Zulfikri Suleman. MA
Anggota



Suryadrajat S.Sos. M.Si
Anggota



**Indralaya, Februari 2011
Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**

Dekan,



Dra. Dyah Hapsari ENH. M.Si
NIP.16010021992032001

Motto dan Persembahan

*Hidup Ini adalah Film Terbaik, Maka Berjuanglah Untuk
Mendapatkan Suatu Peran Yang di Inginkan Bukan Menunggu
Untuk Mendapatkannya
(iid)*

*"Kerjakanlah Pekerjaan Yang Membawa Berkah Bagimu Dan Orang
Yang Kamu Cintai"*

*"Lebih baik mengalami kegagalan daripada tidak pernah mencoba
sama sekali"*

Ku persembahkan skripsi ini kepada:

- Allah SWT serta nabi besar Muhammad SAW
- kedua orang tuaku yang terkeren dan terhebat di dunia
- Ketiga adikku tersayang (Ismi, Wira dan Shista)
- Teman-temanku sealmamater
- Kepada Neknang dan Nekneh ku yang tersayang
- Kepada I'm Just a kid's yang melodic

ABSTRAK

Fokus sajian dalam skripsi ini adalah "Pelaksanaan Program Sekolah Demokrasi Banyuasin di Yayasan Puspa Palembang Indonesia Periode 2008-2009", dalam penelitian ini ada dua rumusan masalah yang akan dibahas yaitu : 1) Bagaimana pelaksanaan Sekolah Demokrasi Banyuasin sebagai penyelenggara pendidikan yang mempunyai misi pembelajaran dibidang demokrasi? 2)Faktor apa saja yang mendukung serta menghambat proses pelaksanaan Program Sekolah Demokrasi di Banyuasin?

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini dikategorikan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Informan sebanyak dua orang. Unit analisis berupa organisasi. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap kesimpulan.

Hasil penelitian ini melihat bahwa Sekolah Demokrasi Banyusain berbeda dengan sekolah-sekolah lain pada umumnya, memiliki metode-metode pembelajaran yang juga berbeda dan kegiatan belajarnya pun meliputi dua class yaitu in-class dan out-class, serta para pesertanya pun terdiri dari berbagai kalangan politisi, tokoh masyarakat, jurnalis, aktivis LSM, pendidik, pembisnis, tokoh muda dan kalangan profesional

Kata Kunci: Pelaksanaan, Sekolah Demokrasi Banyuasin periode 2008-2009, Yayasan Puspa Palembang Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkah dan rahmat-Nya jualah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini yaitu Pelaksanaan Program Sekolah Demokrasi di Yayasan Puspa Palembang Indonesia Periode 2008-2009. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana (S1) pada jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi dan dalam pengambilan data, tentunya penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materil. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dra. Dyah Hapsari ENH, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, sekaligus Pembimbing I, yang telah banyak memberi masukan serta saran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak DR Zulkifli selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Mery Yanti, S. Sos, M. Si selaku sekretaris jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Ibu Diana Dewi Sartika, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberi masukan serta bimbingan kepada penulis untuk

menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Sosiologi serta seluruh staf Karyawan dan karyawati Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak dan Ibu staf Yayasan Puspa Indonesia yang telah memberikan izin serta membantu penulis dalam pencarian dan pengumpulan data selama penulis melakukan penelitian hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Rasa terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada Ayah dan Ibu tercinta, serta kakek dan nenek atas segala yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
8. Seluruh teman-temanku di jurusan Sosiologi angkatan 2004.
9. Serta berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama ini.

Penulis sangat menyadari bahwa penulis hanya manusia biasa yang tentunya tidak terlepas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa pun yang membacanya.

Wassalammu'alaikum. Wr. Wb.

Indralaya, Januari 2011

Iid Primadona

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3. Tujuan dan manfaat Penelitian..... | 7 |
| 1.4. Tinjauan Pustaka | 8 |
| 1.5. Metode Penelitian | |
| 1.5.1. Metode Penelitian..... | 18 |
| 1.5.2. Sifat dan Jenis Penelitian | 18 |
| 1.5.3. Lokasi Penelitian..... | 19 |
| 1.5.4. Penentuan Informan | 19 |
| 1.5.5. Unit Analisis..... | 20 |
| 1.5.6. Data dan Sumber Data | 20 |
| 1.5.7. Teknik Pengumpulan Data..... | 20 |
| 1.5.8. Teknik Analisis Data..... | 22 |
| BAB II KERANGKA PEMIKIRAN | |
| 2.1. Implementasi | 24 |
| 2.2. Implementasi Edward III..... | 27 |
| 2.3. Implementasi Program Sekolah Demokrasi..... | 31 |
| BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN | |
| 3.1. Deskripsi Yayasan Puspa Indonesia..... | 33 |

| | |
|---|-----------|
| 3.2. Struktur Organisasi Yayasan Puspa Indonesia..... | 34 |
| 3.3. Deskripsi Sekolah Demokrasi..... | 37 |
| 3.4. Pembagian Tugas dalam Program Sekolah Demokrasi..... | 38 |
| 3.5 Deskripsi Informan..... | 40 |
| | |
| BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN | |
| 4.1. Analisis Tentang Sekolah Demokrasi..... | 47 |
| 4.2. Analisis Proses Pelaksanaan Sekolah Demokrasi | 51 |
| 4.3. Faktor-faktor Pendukung dan Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Sekolah Demokrasi..... | 72 |
| | |
| BAB V PENUTUP | |
| 5.1. Kesimpulan | 77 |
| 5.2. Saran..... | 78 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 82 |
| | |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Program pelatihan "Sekolah Demokrasi" merupakan program pelatihan demokrasi yang diselenggarakan oleh Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) dan didukung oleh *Netherlands Institute for Multi-Party Democracy* (NIMD). KID menyakini nilai-nilai universal demokrasi seharusnya operasional dalam konteks budaya lokal. Maka dari itu, KID bekerja sama dengan mitra lokal dalam penyelenggaraan program pelatihan "Sekolah Demokrasi" di lima provinsi yaitu Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Banten dan Sumatera Selatan.

Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) atau *Indonesian Community for Democracy*, adalah sebuah Perkumpulan yang baru dibentuk dengan tujuan mendorong kehidupan demokrasi melalui pendidikan dan pelatihan. Gagasan awalnya muncul dari diskusi beberapa tokoh di Indonesia dengan wakil-wakil dari *Institute for Multiparty Democracy* (IMD) di Den Haag, negeri Belanda, yang telah dikenal luas secara internasional karena inisiatif dan kegiatannya mendorong kehidupan multipartai dan proses demokratisasi di sejumlah negara di Afrika dan Amerika Selatan.

Gagasan ini kemudian didiskusikan dan dikonsultasikan dengan berbagai kalangan di berbagai tempat di Indonesia selama dua tahun. Diskusi dan



konsultasi tersebut telah dilakukan dengan tujuan ganda, yaitu mengecek apakah ada kebutuhan riil terhadap pendidikan dan pelatihan demokrasi, dan juga apakah menurut pandangan pihak-pihak tersebut gagasan ini mungkin terlaksana dan dapat didukung oleh tenaga-tenaga yang memiliki cukup kemampuan dan komitmen untuk mewujudkannya.

Persiapan pembentukan KID telah berlangsung selama dua tahun. Suatu Komite Pengarah Nasional (KPN) dibentuk Bulan Mei 2004 di Bogor, dan KID resmi di launch tanggal 27 Oktober 2004 di Jakarta.

Visi dan Misi KID

VISI

1. Membangun fasilitas dan forum pencerahan nilai-nilai dan tradisi demokrasi serta latihan penguasaan dan pemanfaatan mekanisme serta peralatan demokrasi;
2. Menyelenggarakan forum dialog dan refleksi atas perkembangan demokrasi;
3. Membangun suatu on-line knowledge system untuk peminat, pakar dan praktisi demokrasi;
4. Mengadakan pertukaran dan pengalaman berdemokrasi

MISI

Memfasilitasi warganegara agar sadar politik dan peduli terhadap sistem dan mekanisme demokrasi, sebagai wahana mewujudkan aspirasi dan aneka

kepentingan dan sekaligus sebagai bentuk partisipasi mereka dalam mewujudkan lingkungan kehidupan yang aman, adil, damai, sejahtera bersaudaraan lintas-batas yang beradab.

Membangun demokrasi sebagai jembatan antara rakyat dengan para pelaku politik agar rakyat mampu memanfaatkan ruang dan peluang untuk terus mengontrol setiap proses pengambilan keputusan publik yang berdampak langsung ataupun tidak langsung atas peri-kehidupan warga negara. (<http://www.komunitasdemokrasi.or.id>. Di akses pada 10-5-2010)

Oleh karena itu Komite Indonesia untuk Demokrasi (KID) mempunyai gagasan untuk membentuk semacam "Sekolah Demokrasi" didasarkan pada pertimbangan bahwa demokrasi dapat didorong maju dengan menggunakan berbagai cara yang semakin memungkinkan berjalannya proses-proses yang membuka partisipasi rakyat secara lebih luas. Proses-proses tersebut dapat disingkat dengan beberapa kata kunci seperti rekrutmen politik, artikulasi kepentingan dan aspirasi politik serta agregasi berbagai kepentingan tersebut agar mendapat dukungan yang lebih luas, yang kemudian dibantu oleh komunikasi politik untuk membuat agregasi kepentingan itu kembali diterima oleh para aktor politik dan para beneficiaries demokrasi sebagai kepentingan mereka (Brosur Program Sekolah Demokrasi Banyuasin, Yayasan Puspa Indonesia).

Untuk itu Yayasan Puspa Indonesia (YPI) yang di percaya oleh Komite Indonesia untuk Demokrasi (KID) mulai tahun 2007 ini mendirikan Sekolah Demokrasi di Sumsel yang bertujuan untuk :

1. Memberikan wawasan tentang hak politik dan hak-hak sipil di kalangan Sekolah Demokrasi, masyarakat akar rumput, aktivis parpol, pelaku bisnis, dan anggota parlemen (DPRD) untuk lebih memahami hak-hak rakyat, keadilan sosial, ekonomi, dan politik, pengawasan pembangunan, proses pembuatan kebijakan dan gerakan advokasi anti korupsi untuk mendukung reformasi.
2. Memberikan kemampuan teknis agar Sekolah Demokrasi dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat, responsif terhadap isu-isu demokrasi, gender, HAM, dan mendukung gerakan anti korupsi.
3. Mendisain cikal bakal Komite Komunitas melalui kultur jaringan dan gerakan perubahan yang dilakukan secara bersama guna melahirkan tata pemerintahan lokal serta sistem politik demokratis, berperspektif gender, HAM, dan anti korupsi.

Yayasan PUSPA Indonesia (Pusat Studi Pemberdayaan Perempuan dan Anak Indonesia) adalah organisasi non-pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bersifat nirlaba, berdiri sejak tahun 1995 dengan nama Masyarakat Kajian Perempuan Parana (MKPP) yang memfokuskan perhatian pada kebudayaan dengan perspektif gender. Kegiatan MKPP antara lain menerbitkan antologi puisi dengan judul Perempuan Musi I dan Perempuan Musi II serta menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sastra budaya berperspektif gender.

Pada tahun 1999, MKPP ini menambah perhatian pada permasalahan anak, maka nama MKPP berubah menjadi PUSPA Indonesia.

Pembukaan Sekolah Demokrasi Banyuasin diawali dengan sambutan Direktur Eksekutif PUSPA Indonesia, Ketua Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID), Wakil dari Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan Wakil dari Bupati Banyuasin, kemudian secara resmi Sekolah Demokrasi Banyuasin dibuka dengan memukul gong tiga kali oleh dua pejabat yang mewakili Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Banyuasin. Pemukulan gong yang menandai pembukaan Sekolah Demokrasi Banyuasin ini

Pembukaan Sekolah Demokrasi dihadiri sebanyak 92 orang yang terdiri dari elemen kalangan militer, polisi, lembaga politik, pelaku bisnis, dan masyarakat sipil di Propinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Banyuasin. Pembukaan Sekolah Demokrasi Banyuasin selain ditandai dengan pemukulan gong, juga Ceramah Umum yang disampaikan DR. Ignas Kleden dengan tema "Demokrasi dan Kemiskinan". Ceramah yang disusul dengan diskusi itu disambut antusias peserta Sekolah Demokrasi, wartawan dan aktivis mahasiswa di kota Palembang. Karena tertarik dengan Sekolah Demokrasi Banyuasin.

Di dalam pendidikan demokrasi ini terdiri dari dua paket. *Paket Pertama*, Konsepsi Demokrasi, Perkembangan Pemikiran dan Praktik Demokrasi, Sistem Politik dan Pemerintahan, Kebijakan Publik, Gerakan Sosial, dan *Paket Kedua*, Analisis Kemasyarakatan, Demokrasi, HAM dan Hukum, Demokrasi dan Bisnis, Resolusi Konflik dan modul lokal adalah Gender dan Demokrasi. Selain itu,

peserta didik sekolah demokrasi mendapat materi di luar kelas seperti *Gender meeting, political meeting, leader community meeting, village discussion, talk show, fieldtrips*, dan *dialog public*.

Namun, di dalam proses pendidikan demokrasi diharapkan peserta menghormati aturan-aturan main dalam rangka menumbuhkan disiplin. Karena itu, evaluasi pendidikan sekolah demokrasi meliputi tingkat kehadiran 10 %, partisipasi 20%, penugasan 35%, dan ujian komprehensif 35%.

Akhir dari proses pendidikan, peserta sekolah demokrasi diharapkan kelak mampu melahirkan komite komunitas yang berperan melakukan “advokasi politik”. Sedangkan lembaga pelaksana, dalam hal ini PUSPA Indonesia, tetap memfokuskan diri sebagai penyelenggara sekolah demokrasi. Kegiatan Komite Komitas dan Lembaga Pelaksana diharapkan mampu mendorong proses transformasi demokratis di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, khususnya di kabupaten Banyuasin. (www.simpuldemokrasi.co.id:04-05-10)

Penelitian ini akan meneliti mengenai pelaksanaan program Sekolah Demokrasi khususnya di Banyuasin dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menarik untuk diteliti karena pelaksanaan Sekolah Demokrasi tersebut berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya, baik dalam proses belajar mengajarnya serta kurikulum yang dipakai, Sekolah Demokrasi ini juga bisa diikuti oleh berbagai kalangan.

I.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti mengenai beberapa hal yaitu mengenai keberadaan sekolah demokrasi bila melihat bahwa bukankah saat ini sudah ada lembaga pendidikan formal yang bisa mengajarkan pendidikan tentang demokrasi, tetapi mengapa sekolah demokrasi berdiri sendiri. Aspek lainnya yaitu mengenai faktor – faktor yang dianggap mampu mendorong serta menghambat jalannya sekolah demokrasi ini. Secara garis besar, permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sekolah demokrasi Banyuasin sebagai penyelenggara pendidikan yang mempunyai misi pembelajaran dibidang demokrasi?
2. Faktor apa saja yang mendukung serta menghambat proses pelaksanaan Program Sekolah Demokrasi di Banyuasin?

I.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

I.3.I. Tujuan Penelitian

I.3.1.1 Tujuan umum

.Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman di dalam Masyarakat secara luas tentang pentingnya Demokrasi.

1.3.1.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan dari penelitian ini secara khusus adalah Untuk mengetahui dan memahami proses dari pelaksanaan sekolah demokrasi sebagai penyelenggara pendidikan yang mempunyai misi pembelajaran dibidang demokrasi. Serta untuk mengetahui tentang faktor apa saja yang bisa mendorong dan menghambat proses Sekolah Demokrasi ini.

I.3.2. Manfaat Penelitian

I.3.2.I. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, berupa pengetahuan tentang sekolah demokrasi, mengenai pelaksanaan sekolah demokrasi.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi Yayasan Puspa sebagai instansi pelaksana Sekolah Demokrasi Banyuasin untuk menyusun rencana dalam pelaksanaan Sekolah Demokrasi Banyuasin selanjutnya.

1.4 TINJAUAN PUSTAKA

1.4.1 Hubungan Pendidikan dan Demokrasi

Peranan pendidikan dalam kehidupan kenegaraan akan banyak memberikan dimensi pembangunan karakter bangsa (*nations character building*). Aktualisasi karakter masyarakat dapat membentuk nilai-nilai budaya yang tumbuh pada

komunitas lingkungan sosial-politik, baik dalam bentuk berpikir, berinisiatif, dan aneka ragam hak asasi manusia. Dengan demikian, pendidikan senantiasa melahirkan tata nilai kehidupan masyarakat dalam sistem kenegaraan yang dianut oleh suatu pemerintahan. Pada kondisi negara yang memiliki heterogenitas masyarakat, cenderung menerapkan sistem demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahan.

Konteks demokrasi secara sederhana menunjukkan adanya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip utama dalam penerapan alam demokrasi adalah adanya pengakuan atas kebebasan hak individual (*human right*) terhadap upaya untuk menikmati hidup, sekaligus dalam mekanisme menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Sehingga, pada gilirannya dapat membentuk kondisi *community development* pada nilai-nilai keberagaman, baik berpikir, bertindak, berpendapat, maupun berkreasi. Sistem demokrasi merupakan suatu bentuk tindakan yang menghargai perbedaan prinsip, keberagaman (heterogenitas) nilai-nilai masyarakat dalam suatu negara. Konsekuensi logis dari penerapan demokrasi adalah memberikan kebebasan bertindak pada setiap orang sesuai dengan kehendaknya dalam batasan normatif tertentu.

Terbentuknya budaya demokrasi pada suatu negara banyak ditentukan oleh penerapan sistem pendidikan yang berlaku, sehingga semakin demokratis pelaksanaan pendidikan di suatu negara, akan memberikan implikasi pada peningkatan taraf kepedulian masyarakat terhadap hak dan kewajibannya dalam menggunakan pikiran, tenaga, dan suaranya. Impact yang sangat kuat dari

penerapan demokrasi pendidikan yaitu berkembangnya keberagaman pola pikir masyarakat, kreativitas, dan daya inovasi yang tinggi.

Demokrasi dalam dunia pendidikan memiliki konsekuensi bagi terbentuknya desentralisasi kewenangan, di mana pengelolaan pendidikan akan banyak ditentukan oleh pelaksana langsung, baik pengelola, tenaga kependidikan, maupun masyarakat dalam menciptakan isi (materi) sistem pembelajaran, termasuk pengembangan kualitas peserta didik. Di sisi lain, demokrasi pendidikan akan berdampak pula pada aspek kurikulum, efisiensi administrasi, pendapatan dan biaya pendidikan, serta pemerataan terhadap perolehan pendidikan masyarakat.

Demokrasi dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia, sebagaimana di atur dalam UU nomor 2 tahun 1989 BAB III pasal (5) menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Artinya bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memperoleh pendidikan dalam rangka mengembangkan diri dan meningkatkan pengetahuan, serta kemampuan mereka.

Letak geografis Negara Indonesia yang merupakan negara maritim terbesar dan mempunyai keberagaman kondisi masyarakat baik secara linguistik, budaya, agama, dan etnis, mengharuskan penerapan sistem pendidikan yang demokratis. Sejalan dengan adanya tuntutan reformasi, hingga pada pemberlakuan otonomi daerah berdasarkan UU nomor 22 dan 25 tahun 1999, telah memberikan paradigma baru dalam sistem pendidikan yang mengarah pada prinsip

desentralisasi. Demokrasi pendidikan di Indonesia mempunyai dua tugas utama, yaitu sebagai pengembangan potensi nyata yang dimiliki oleh setiap daerah, dan pengembangan nilai-nilai hidup yang berlaku di dalam masyarakat suatu daerah.

Demokrasi dan pendidikan merupakan suatu kondisi tata nilai yang harus dikembangkan dalam masyarakat yang heterogen, sehingga dimungkinkan dapat mengembangkan potensi daerah serta nilai-nilai kebudayaan yang hidup di masyarakat. Demikian pula halnya dengan kondisi bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman letak geografis. (<http://one.indoskripsi.com>.2008 :03-02-10)

1.4.2 Sekolah Demokrasi

Tuntutan akan kehidupan demokratis akhir-akhir ini kian berkembang di berbagai belahan dunia, terutama di Negara-negara sedang berkembang yang sebelumnya tidak mengenal sistem pemerintahan yang demokratis, yang di pentingkan saat ini hanya upaya-upaya nyata untuk menegakkan suatu sistem politik yang memungkinkan terealisasinya hak-hak azasi manusia. Namun pertumbuhan serta perkembangan demokrasi, khususnya di Negara-negara berkembang bukannya tanpa ancaman bahaya dan dapat beresiko kembali terperangkap dalam system politik yang tidak demokratis, bahkan di Negara ini sedang bertumbuh kekuatan-kekuatan yang sewaktu-waktu bisa mengagalkan perkembangan cara hidup demokratis. (Kanisius,1996;81)

Di Indonesia, penerapan demokrasi dalam dunia pendidikan dilandasi oleh adanya kesadaran akan keberagaman kondisi masyarakat, dimana sistem pengelolaan pemerintahan dalam menangani masalah pendidikan di arahkan pada prinsip desentralisasi. Hal ini kian menyampingkan kebijakan sentralisasi yang diterapkan pada era orde baru. Komitmen penerapan demokrasi pendidikan di Indonesia dalam mengemban misi reformasi total, diterbitkan UU nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atas dasar prakarsa dan partisipasi masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, Indra Djati Sidi (2000) mengemukakan empat isu kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang perlu direkonstruksi dalam rangka otonomi daerah, baik untuk tujuan peningkatan mutu pendidikan, efisiensi pengelolaan pendidikan, relevansi pendidikan, maupun pemerataan pelayanan pendidikan, sebagai berikut (Sjahrir, 102:2004).

Pertama, upaya peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan menetapkan tujuan dan standar kompetensi pendidikan, yaitu melalui konsensus nasional antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat. Standar kompetensi yang mungkin akan berbeda antar sekolah atau antar daerah akan menghasilkan standar kompetensi nasional dalam tingkatan standar minimal normal (*mainstream*), dan unggulan.

Kedua, peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan mengarah pada pengelolaan pendidikan berbasis sekolah, dengan memberi kepercayaan yang

lebih luas kepada sekolah untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia bagi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan.

Ketiga, peningkatan relevansi pendidikan mengarah pada pendidikan berbasis masyarakat. Peningkatan peran serta orang tua dan masyarakat pada level kebijakan (pengambilan keputusan) dan level operasional melalui komite (dewan) sekolah. Komite ini terdiri atas kepala sekolah, guru senior, wakil orang tua, tokoh masyarakat, dan perwakilan siswa. Peran komite meliputi perencanaan, implementasi, monitoring, serta evaluasi program kerja sekolah.

Keempat, pemerataan pelayanan pendidikan mengarah pada pendidikan yang berkeadilan. Hal ini berkenaan dengan penerapan formula pembiayaan pendidikan yang adil dan transparan, upaya pemerataan mutu pendidikan dengan adanya standar kompetensi minimal, serta pemerataan pelayanan pendidikan bagi siswa pada semua lapisan masyarakat².

Oleh karena itu salah satu program yang dilaksanakan oleh KID (Komunitas Indonesia untuk Demokrasi) dan didukung oleh *Netherlands Institute for Multi-Party Democracy* adalah Simpul Demokrasi (SD). Pilihan penggunaan kata "Simpul Demokrasi" memang dilakukan untuk merancang dan membuat terobosan dalam proses pembelajaran demokrasi dalam model yang berbeda dengan proses pembelajaran di sekolah formal. Para peserta berinteraksi dengan sesama dan dengan nara sumber serta fasilitator sebagai demos atau warga masyarakat yang sedang bertransformasi menjadi lebih demokratis.

Sekolah demokrasi merupakan salah satu program pengembangan demokrasi dalam kerangka memajukan demokratisasi. Program ini di dasarkan pada pertimbangan bahwa demokrasi dapat di dorong maju dengan menggunakan berbagai cara yang memungkinkan berjalannya proses-proses yang membuka partisipasi rakyat secara lebih luas. Proses-proses tersebut dapat pula disebut sebagai rekrutmen politik, artikulasi kepentingan dan aspirasi politik serta agregasi berbagai kepentingan tersebut agar mendapat dukungan yang lebih luas, yang kemudian diperkuat oleh komunikasi politik untuk membuat agregasi kepentingan itu kembali diterima oleh pelaku politik dan para beneficiaries sebagai kepentingan mereka.. Terdapat tiga titik tolak pengertian demokrasi untuk konteks pelaksanaan program ini. Pertama, demokrasi dipahami sebagai nilai universal yang patut/layak dipertahankan, sebab nilai-nilai universal demokrasi sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dipahami manusia dimanapun mereka berada. Misalnya: kebebasan, keadilan, persamaan didepan hukum, dan hak menentukan diri sendiri. Kedua, demokrasi dipahami dalam hubungannya dengan instrument-instrumen yang dibutuhkan dalam proses demokratisasi, baik instrumen untuk sosialisasi pengetahuan tentang demokrasi, atau instrumen untuk mendorong internalisasi demokrasi dalam proses sosial-politik-ekonomi-budaya, maupun instrumen untuk menjalankan demokrasi dalam praktek seperti administrasi, manajemen dan keuangan, serta instrumen untuk evaluasi dan pengukuran terhadap maju-mundurnya proses demokratisasi. Ketiga, demokrasi difahami sebagai kontekstualisasi nilai-nilai universal dalam konteks kebudayaan

dan konteks sejarah yang spesifik dari setiap negara maupun dari setiap daerah. Dan salah satu konteks yang akan menjadi perhatian program sekolah demokrasi adalah interaksi antar empat pranata utama demokrasi, yakni lembaga politik, para politisi, komunitas bisnis, dan rakyat (civil society). Ringkasnya, sekolah demokrasi diharapkan menjadi forum pendidikan dan pelatihan bagi orang-orang muda yang strategis dan mempunyai komitmen politik untuk berperan aktif dalam memajukan demokrasi, khususnya di wilayah dimana mereka berada. Secara nasional, program ini dijalankan di Malang (Jatim), Banyuwangi (Sumatera Selatan), Tangerang (Banten), Lembang (NTT), dan Jeneponto (Sulsel). Pelaksanaan program di kesemua wilayah itu sama-sama diarahkan pada dua tujuan utama, yakni;

1. Akan diarahkan kepada pengembangan kesadaran, apresiasi dan komitmen terhadap kebebasan dan martabat setiap orang;
2. Akan diarahkan untuk membuka jalan dan kemungkinan untuk terciptanya partisipasi politik yang lebih luas. (www.simpuldemokrasi.com. 11-12-09)

I.4.3 Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang bersumber dari Media Center Pendidikan Nasional pada tahun 2006 yang berjudul *Pendekatan dalam Teknologi Pendidikan* Menjawab Persoalan pendidikan. Penelitian ini meneliti mengenai pentingnya pengembangan teknologi pendidikan untuk menjawab persoalan-persoalan pendidikan. Pendekatan pembelajaran yang sebelumnya tidak mungkin jika dilakukan secara

konservatif maka dengan teknologi pendidikan akan menjadi mungkin. Teknologi pendidikan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas.

Penelitian selanjutnya yaitu dilakukan oleh Frederik pada Tahun 2003 mengenai pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistematis Pendidikan Demokrasi. Pendidikan kewarganegaraan dalam pengertian sebagai *citizenship education*, secara substantif dan pedagogis didesain untuk mengembangkan warganegara yang cerdas dan baik untuk seluruh jalur dan jenjang pendidikan. Sampai saat ini bidang itu sudah menjadi bagian integral dari instrumentasi serta praksis pendidikan nasional Indonesia dalam. Aspek esensial yang menjadi faktor perekat (*integrating forces*) sistem pendidikan kewarganegaraan sehingga membentuk suatu kerangka paradigmatis yang koheren adalah konsep warganegara yang cerdas, demokratis, taat hukum, beradab, dan religius yang dikristalisasikan menjadi 90 butir perangkat kompetensi kewarganegaraan (pengetahuan kewarganegaraan, ahlak/sikap kewarganegaraan, dan keterampilan kewarganegaraan) yang berkembang secara dinamis (re-searchengines.com. frederik. *Pentingnya pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistematis Pendidikan Demokrasi:20-1-09*)

Penelitian selanjutnya yaitu mengenai Pemberlakuan desentralisasi pendidikan mengharuskan diperkuatnya landasan dasar pendidikan yang demokratis, transparan, efisien dan melibatkan partisipasi masyarakat daerah yang di tulis oleh Akhmad Suseno pada tahun 2009 Bahwa pendidikan merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan manusia, karena pendidikan berfungsi

sebagai pengembang pengetahuan, ketrampilan, nilai kebu-
dayaan.(<http://www.hariansib.com>, Akhmad Suseno.20-11-09)

Penelitian lainnya yaitu mengenai Pemanfaatan Sumber Belajar di Sekolah oleh Purwanto pada tahun 2008. Pada hakikatnya setiap manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Adanya pemberian pendidikan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan akademis dan psikologis setiap manusia dalam hidupnya. Dunia pendidikan sekarang ini tengah menghadapi tantangan dalam cepatnya arus globalisasi. Dunia pendidikan dituntut agar dapat mendorong dan mengupayakan peningkatan kemampuan dasar untuk menjadi individu unggul dan memiliki daya saing yang kuat secara cepat dan dapat bersikap demokratis (purwanto.web.id. Purwanto, *Pemanfaatan Sumber Belajar di Sekolah:20-11-09*)

Penelitian selanjutnya yaitu kajian mengenai didirikannya Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif (ASAH PENA) Indonesia didirikan pada tahun 2006 , yang sebagai jawaban atas kebutuhan program pendidikan yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan individual peserta didik (tailor made) dengan memanfaatkan berbagai potensi dan sumber daya yang sudah ada dalam keluarga dan masyarakat. Anak belajar di dalam ruang-ruang kelas yang jauh lebih besar, yakni rumah, lingkungan tetangga, dan seluruh dunia, sehingga kreativitas dan daya inovasi anak pun akan semakin berkembang. Misi utama ASAH PENA Indonesia, dengan bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Kebijakan Inovasi Pendidikan (Puslitjaknov) Depdiknas yang diketuai Dr Agung Purwadi, MEng

adalah mengembangkan *homeschooling* dan pendidikan alternatif demi memberi manfaat terbesar bagi anak didik dan masyarakat pada umumnya. "Pendidikan adalah hak anak. Jadi kalau anak tidak bisa sekolah formal karena tiada biaya ataupun memang tak betah sekolah, orangtua dan pemerintah harus terus mengupayakan pendidikan untuk anak, bagaimanapun caranya (www.homeschooling.com.Rina Meirina.23-11-09).

Bila dibandingkan dengan penelitian diatas, maka penelitian yang akan dilakukan ini lebih berfokus kepada bagaimana pelaksanaan sekolah demokrasi banyuasin serta bagaimana system pemberian nilai dari para tenaga pengajar dengan melihat bahwa peserta didiknya terdiri dari berbagai kalangan usia dan pekerjaan dan pertemuan tatap muka pun hanya dilakukan 2 kali dalam seminggu.

1.5 METODE PENELITIAN

1.5.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Tujuan utama dalam menggunakan metode ini adalah untuk menggambarkan sifat dari suatu keadaan yang ada pada waktu penelitian dilakukan dan menjelajahi penyebab dari gejala-gejala tersebut .

1.5.2. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian deskriptif kualitatif yaitu terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masaalah, keadaan atau peristiwa

sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta (*facta finding*). (Ibnu dan Dasna,2003: 25)

1.5.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu Yayasan Puspa Indonesia yang beralamat di Jl. Radial, Komplek Rumah Susun, Blok 32, Lantai 1 No. 08 Rt 40, 24 Ilir Palembang, penetapan lokasi penelitian berdasarkan ketetapan yang ada bahwa yayasan Puspa merupakan penyelenggara Sekolah Demokrasi Banyuasin satu-satunya di Sumatera Selatan untuk saat ini.

1.5.4 Penentuan Informan

Penentuan informan dimaksudkan supaya dalam waktu yang relatif singkat mampu memperoleh informasi yang dapat membantu kelancaran penelitian ini. Persyaratan dalam memilih dan menentukan informan sangat diperlukan. Kriteria informan dalam penelitian ini yaitu :

- Informan adalah orang yang bekerja pada Yayasan Puspa Indonesia dan yang menjadi panitia dalam pelaksanaan sekolah demokrasi banyuasin.
- Informan adalah siswa yang menjadi peserta dalam pelaksanaan sekolah demokrasi banyuasin.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini ada dua orang, yaitu Dra. Zairina Bakrie selaku Direktur Eksekutif Yayasan Puspa Palembang Indonesia

dan Bapak Tareh Rasyied selaku Ketua Koordinator Pelaksana Sekolah Demokrasi.

1.5.5 Unit analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi, yaitu Yayasan Puspa Indonesia.

1.5.6 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data pokok yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Data tersebut berupa hasil wawancara peneliti dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini,
- b. Data sekunder, yaitu data yang digunakan untuk mendukung data primer yang diperoleh dari studi kepustakaan, internet, serta dokumentasi yang ada hubungannya dengan penelitian ini yang menyangkut pelaksanaan Sekolah Demokrasi Banyuasin.

1.5.7 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara Mendalam

Wawancara Mendalam yaitu suatu teknik yang meliputi pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara pewawancara dan informan dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada informan. Dalam wawancara yang akan dilakukan nantinya, peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan proses pelaksanaan sekolah demokrasi banyuasin, yang akan dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumen sehingga pertanyaan tidak keluar dari konsep penelitian, dalam hal ini tujuan wawancara mendalam adalah untuk mendapatkan data primer.

b. Observasi

Observasi yaitu suatu teknik dengan melakukan pengamatan langsung terhadap proses pelaksanaan pada objek penelitian. Dalam teknik ini, yang akan dilakukan oleh peneliti adalah turun kelapangan secara langsung, observasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan apa adanya.

c. Dokumentasi

Yaitu suatu teknik dengan mempelajari teori-teori dan pendapat ahli, photo-photo serta bahan tulisan lain yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan ini.

1.5.8 Teknik Analisis Data

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan, yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sumber lainnya. Kemudian dapat dilanjutkan dengan tahap selanjutnya. Menurut Miles dan Haberman, terdapat tiga tahap dalam analisa data, yaitu tahap reduksi, tahap penyajian, dan terakhir tahap kesimpulan. (Bungin, 2006 : 49).

1. Tahap Reduksi Data

Pada tahap ini peneliti akan memusatkan perhatian pada data yang ada di lapangan yang telah terlebih dahulu terkumpul sehingga dapat memberikan gambaran terutama nilai pendidikan pada masa lampau dan sekarang, selanjutnya data yang didapat akan disederhanakan dalam arti mengklasifikasikan data atas dasar tema – tema, memadukan data yang tersebar, menelusuri tema – tema untuk merekomendasikan data tambahan kemudian peneliti akan melakukan abstraksi terhadap data tersebut menjadi uraian singkat. Dengan data yang telah didapat, maka peneliti akan mencoba menguraikan bagaimana penyelenggaraan sekolah demokrasi banyuasin.

2. Tahap Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks naratif terlebih dahulu, artinya data mengenai pelaksanaan sekolah demokrasi banyuasin akan disajikan dalam bentuk cerita. Yang selanjutnya data tersebut

akan diringkas dan disajikan dalam bentuk penyajian yang lebih mudah untuk dimengerti.

3. Tahap Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti akan melakukan uji kebenaran dan mengungkapkan makna disetiap kata yang muncul dari data mengenai pelaksanaan sekolah demokrasi banyuasin. Setiap data yang menunjang fokus penelitian akan disesuaikan kembali dengan data-data yang didapat sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan publik*, Bandung :Alfabeta
- Berry, David. 2003, *Pokok – pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Danim, Sudarman. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV Pustaka Setia
- Haynes, Jeff. 2000. *Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Hikam, Muhammad. 1999. *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta : LP3ES
- Ibnu, S., Mukhadis, A dan Dasna, I.W., 2003. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang
- Muhammad, Arni.2002. *Komunikasi Organisasi*, Jakarta : Bumi Aksara
- Riyadi Soeprpto. 2001. *Interaksionisme Simbolik Perspektif Sosiologi Modern*. Yogyakarta: Averroes Press dan Pustaka Pelajar.
- Surayin. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung : Yrama Widya.
- Wahab, Solihin Abdul, 2004. *Analisis kebijakan dan Formulasi Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara
- Wahon, Fredy. 2009. *Geliat Demokrasi di Indonesia*, Jakarta : Lewoleba

Internet:

- www.okezone.com. Sudyram :*teori sosiologi pendidikan*. Diakses tanggal 03 Mei 2010
- [http.www.matapelajar.com](http://www.matapelajar.com). Dwi Rusmianto : *Sebuah Fenomena Demokrasi* Diakses tanggal 13 Februari 2010

www.victory.wordpress.com. Ally Muhammad : *Fenomena Demokrasi Indonesia*
Diakses tanggal 13-02-10

<http://www.dirrga.com>, Amir Saleh, Masyarakat awam dan Demokrasi,. Diakses
tanggal 04-02-10

www.homeschooling.com. Rina Meirina. *Kajian Pendidikan ASAH PENA* :
Diakses tanggal 23-11-09

purwanto.web.id. Purwanto *Pemanfaatan Sumber Belajar di Sekolah*. Diakses
tanggal 20 Nopember 2009

www.averroes.or.id. Averroes Community, *Mengenal Singkat Teori Interaksi
Simbolik* :03-02-10

re-searchengines.com. frederik. *Pentingnya pendidikan Kewarganegaraan Sebagai
Wahana Sistematis Pendidikan Demokrasi*:20-1-09

www.edukasi.net.com. Ahmad rifai, *Jenis-jenis Demokrasi* diakses pada 03
Februari 2010

Brosur Program Sekolah Demokrasi Banyuasin, Yayasan Puspa Indonesia

<http://www.hariansib.com>, Akhmad Suseno. *landasan dasar pendidikan yang
demo kratis, transparan, efisien dan melibatkan partisipasi masyarakat
daerah* :20-11-09

<http://www.Simpuldemokrasi.co.id> diakses tanggal 08 Agustus 2009

<http://one.indoskripsi.com>.2008 diakses pada 03 Februari 2010